



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0365) 44269
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.513/BPISDKP/TU.140/IV/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

4 April 2024

Yth. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Sekretariat Jenderal KKP
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teja Arief Wibawa



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KINERJA TRIWULAN I

2024



BPISDKP
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

© 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I BPISDKP TA 2024

Jembrana, April 2024
Mengetahui,
Kepala Balai



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP.198102172005021001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan, semester dan tahunan, yaitu: Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan; Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan; Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP; Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP; Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada Triwulan I ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Maret 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Jembrana, April 2024

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si

NIP. 19810217 200502 1 001

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja. Sasaran kinerja BPISDKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Kedua sasaran kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis baru di lingkup Sekretariat Jenderal yang diresmikan pada bulan Maret 2022 untuk organisasinya dan April untuk pejabatnya. Sebelumnya pada tahun 2022, DIPA BPISDKP masih tergabung pada DIPA Pusdatin, pada tahun 2023 DIPA BPISDKP telah terpisah dari Pusdatin dan dikelola oleh BPISDKP. Pada Triwulan I 2024 dilakukan pengukuran capaian untuk 2 IKU yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP dan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Kegiatan pendukung IKU telah terlaksana dengan baik hingga akhir Triwulan I dan BPISDKP memperoleh capaian kinerja sebesar **112.63** Analisis terhadap hasil pengukuran IKU pada Triwulan I Tahun 2024 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Kinerja pengelolaan anggaran BPISDKP meliputi anggaran total sebesar **Rp.28.151.820.000** namun terdapat blokir sebesar **Rp. 15.638.541.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW I adalah **Rp. 12.531.279.000**. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP BPISDKP akan melakukan evaluasi capaian serta mempersiapkan langkah – langkah antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100			
	2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	94	133	120
	4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83			
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.7			
	6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86			
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	95	100	105.26
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84			
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95			

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP.....	3
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP.....	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan4	
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	7
2.1. Sasaran Kegiatan.....	7
2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	8
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	11
3.2.1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan.....	12
3.2.2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan.....	13
3.2.3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP.....	13
3.2.4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	15
3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP.....	17
FORMULA.....	17

3.2.6.	Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP.....	18
3.2.7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP.....	19
3.2.8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP.....	20
3.2.9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP.....	21
3.2.10.	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP.....	22
3.3.	Realisasi Anggaran.....	23
Bab IV.	Penutup.....	26
4.1.	Kesimpulan.....	26
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	26
LAMPIRAN.	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional	6
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2024	9
Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan I Tahun 2024	11
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan	12
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan	13
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP	14
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	16
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	18
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP	19
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	19
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	21
Tabel 16. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	21
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	22
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP	23
Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Maret 2024	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku	10
Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan I Tahun 2024 pada portal KKP	14
Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan I tahun 2024	17
Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Maret 2024	25

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan I BPISDKP disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPISDKP.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan

perikanan nasional menjadi bagian dari program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologi bangsa, menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional lima tahun kedepan. Arah RPJMN 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tiga kata kunci dari arahan ini, yaitu : Struktur Perekonomian yang Kokoh, Keunggulan Kompetitif Wilayah dan SDM Berkualitas.

Keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Interim pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja BPISDKP Triwulan I tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen KP 35 TAHUN 2023
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek

strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPISDKP menghadapi beberapa permasalahan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan data geospasial kelautan dan perikanan untuk mendukung program kebijakan KKP, antara lain:

1. Terbatasnya SDM bidang teknis, dimana saat ini tim teknis BPISDKP hanya terdiri atas 5 orang PNS dan 1 orang P3K.
2. BPISDKP memiliki program prioritas nasional Sarana Data Citra Satelit Radar, namun sistem radar yang telah digunakan sudah lewat masanya dan mengakibatkan kegagalan akuisisi atau reject data radar. Untuk itu perlu dilakukan upgrade system agar proses akuisisi berjalan lebih lancar.
3. Blokir anggaran pada kegiatan Sarana Data Citra Satelit Radar yang mengakibatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan hingga akhir Triwulan I.

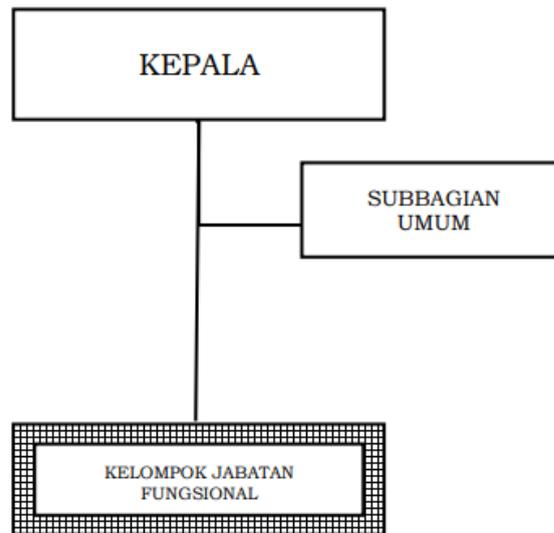
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 49 orang pegawai, yang terdiri dari 17 orang Pegawai ASN dan 32 orang Pegawai Non ASN, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	11 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	4 orang
5.	Non ASN	4 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai ASN di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	3 orang
2.	S2	5 orang
3.	S1	23 orang
4.	SLTA	16 orang
5.	SD	2 orang
Jumlah		49 orang

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 2 orang golongan IV, 12 orang golongan III, dan 3 orang golongan IX. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Pria sebanyak 10 orang dan Wanita sebanyak 7 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Teknis	Struktural dan Dukungan Manajerial	
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	11	4	-	2	17
2.	Non Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	-	3	29	32

Jumlah	11	4	3	31	49
---------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang						Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	IX	
1.	Pria	2	2	3		1	2	10
2.	Wanita	-	2	2	1	1	1	7
	Jumlah	2	4	5	1	2	3	17

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perencana, dan Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP:

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)				TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	
1.	Analis Data Ilmiah		2	2		4
2.	Surveyor Pemetaan		1			1
3.	Pranata Komputer				2	2
4.	Perencana				1	1
5.	Analis Pengelola Keuangan APBN		1			1
6.	Pranata Keuangan APBN				1	1
7.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				1	1
8.	Fungsional Umum					4

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)				TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	
9.	Struktural					2
Total						17

Note : Termasuk Pejabat Transformasi

1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPISDKP tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

menjelaskan bahwa BPISKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 10 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen);
 - IKU 2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen).
- 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen);
 - IKU 4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks);
 - IKU 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
 - IKU 6. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP (nilai);
 - IKU 7. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen);
 - IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen);

- IKU 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai);
- IKU 10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada tahun 2024 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target indikator kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2024 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.

2.3. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh PPK, BPISDKP mendapatkan anggaran operasional sebesar **Rp.28.151.820.000** namun terdapat blokir sebesar **Rp. 15.638.541.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW I adalah **Rp. 12.531.279.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2024

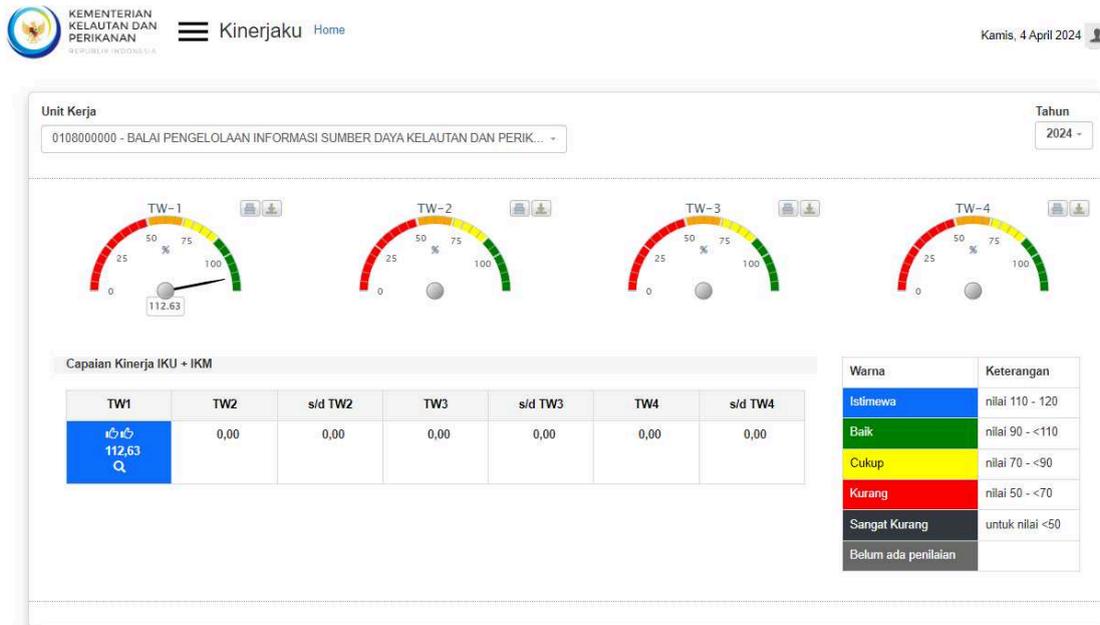
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100
		2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94
		4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.76
		6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		7. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
		8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95
		9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84
		10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP. Analisis capaian kinerja tahun 2024 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2024 terdapat 10 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Pada Triwulan I Tahun 2024 indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah IKU 3 Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dan IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Capaian kinerja IKU BPISDKP periode Triwulan I Tahun 2024 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai 112.63 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku

Pada Laporan Kinerja Triwulan I ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai untuk 2 IKU tersebut selama periode Januari hingga Maret 2024. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga Maret 2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100			
	2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	94	133	120
	4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83			
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.7			
	6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86			
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	95	100	105.26
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84			
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95			

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2024 memiliki periode pengukuran triwulan, semesteran dan tahunan, dimana pada triwulan I ini terdapat 2 IKU yang diukur capaiannya yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP dan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Pada laporan kinerja Triwulan I ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga April 2024 dan

permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan perbaikan untuk pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP Triwulan I tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan

Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai serta telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh stakeholder. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP, serta dimanfaatkan oleh stakeholder. Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target 2 jenis data dan telah tercapai sesuai target. Untuk tahun 2024, target tidak hanya difokuskan pada jumlah jenis data yang dihasilkan, namun juga pada pemanfaatan data tersebut. Target yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 100% data geospasial yang dihasilkan BPISDKP telah terverifikasi, tervalidasi dan termanfaatkan oleh stakeholder. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir periode Triwulan IV.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	2 jenis data	2 jenis data	100%	-	-	-

Hingga Maret 2024, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu perencanaan kegiatan oleh tim teknis. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama triwulan I.

3.2.2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial

Kelautan dan Perikanan

Meliputi citra satelit radar yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2024. Proses pengelolaan data tersebut meliputi pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari raw data hingga menjadi data geospasial level 2 yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan kelautan dan perikanan, termasuk untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah data yang dikelola menjadi data geospasial kelautan dan perikanan dengan jumlah data citra satelit radar yang diakuisisi di BPISDKP. Target pada tahun 2024 adalah 90% dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan					
202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	80%	100%	120%	-	-	-

Hingga Maret 2024 kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah pembahasan terkait rencana buka blokir anggaran, karena anggaran untuk kegiatan ini masih berstatus blokir sebesar Rp.9.957.700.000 pada komponen Peningkatan Kapasitas Sarana Stasiun Bumi.

3.2.3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Pada lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan, hingga Juni 2023 sistem manajemen pengetahuan dilakukan melalui aplikasi

<https://www.bitrix24.net> dengan menggunakan klasifikasi *maximize*, yaitu capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan sejak September 2023 kegiatan pendukung IKU ini dilanjutkan melalui website <https://portal.kkp.go.id/> dengan menggunakan NIP/email KKP sebagai username dan password email sebagai password. Penilaian meliputi keaktifan dengan bobot 100% dengan nilai maksimal 4 dan nilai minimal 3. Adapun nilai tersebut diperoleh dari jenis unggahan pada website dengan rincian nilai:

- a) Unggahan terkait kegiatan mendapat nilai 0.5
- b) Unggahan berupa infografis mendapat nilai 1
- c) Unggahan berupa video mendapat nilai 3

Pegawai yang wajib dinilai terkait IKU ini adalah Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Geospasial SDKP.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP					
202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	92	100	108.69%	94	133	120%

Hingga bulan Maret 2024 telah dilaksanakan keaktifan pada website portal KKP dalam bentuk unggahan berupa artikel dan infografis oleh pejabat terkait. Untuk triwulan berikutnya akan dilakukan pemantauan dan memberikan pengingat untuk mengunggah artikel agar capaian dapat diraih sesuai target.



PENDAHASAN LANJUTAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (FPIK UB) DAN BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPISDKP)

Legislatif 08 Maret 2024

TEJA ARIEF WIBAWA | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembahasan tersebut merupakan implementasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 22 tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagai tindak lanjut pembahasan draft PKS tersebut di BPISDKP pada tanggal 05 Januari 2024.



Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan I Tahun 2024 pada portal KKP

3.2.4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

- a) Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

- b) Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah

melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);

- Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

c) Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360⁰

d) Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
IKU	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	79	86.28	109.21%	-	-	-

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, telah dilaksanakan upaya berupa himbauan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan pada MyASN/SIASN. Target pada tahun 2024 adalah 83 dengan periode pengukuran semesteran, hingga Triwulan I tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP terpantau pada nilai 51.70 dimana nilai tersebut masih dibawah target capaian semester I yang akan diukur pada akhir triwulan II yaitu sebesar 80. Kendala yang dihadapi diantaranya pegawai yang tidak segera mengupdate data pelatihan pada e-pegawai dan kesulitan saat input dikarenakan perubahan lokasi input dan gangguan pada system pada e-pegawai. Untuk pelaksanaan pada triwulan II akan ditingkatkan lagi koordinasi dengan pegawai untuk mengupdate data kepegawaian dan juga sosialisasi serta penyebaran informasi pelatihan, workshop, dan seminar untuk meningkatkan kapasitas pegawai.

IP ASN 2024												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	22.5	90 %	5	12.5 %	27.5	91.67 %	5	100 %	60	SANGAT RENDAH
2	BIRO PERENCANAAN	49	21.84	87.36 %	18.9	47.25 %	7.35	24.5 %	5	100 %	53.08	SANGAT RENDAH
3	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	63	20.97	83.88 %	17.77	44.42 %	11.27	37.57 %	5	100 %	55.01	SANGAT RENDAH
4	BIRO HUKUM	35	21.71	86.84 %	17.07	42.68 %	29	96.67 %	5	100 %	72.79	SEDANG
5	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	42	21.38	85.52 %	18.48	46.2 %	4.17	13.9 %	5	100 %	49.02	SANGAT RENDAH
6	BIRO KEUANGAN	55	20.76	83.04 %	16.9	42.25 %	17.27	57.57 %	5	100 %	59.93	SANGAT RENDAH
7	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	136	20.97	83.88 %	17.07	42.68 %	10.33	34.43 %	5	100 %	53.37	SANGAT RENDAH
8	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	75	21.12	84.48 %	23.87	59.67 %	17.93	59.77 %	5	100 %	67.92	RENDAH
9	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	22.36	89.44 %	18.98	47.45 %	5.36	17.87 %	5	100 %	51.7	SANGAT RENDAH

Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan I tahun 2024

3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
----	--

IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP					
	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
2024	93.75	92.37	98.53%	-	-	-

Target pada tahun 2024 adalah 93.76 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I untuk mendukung tercapainya target tersebut, diantaranya:

- Pelaksanaan revisi DIPA untuk penyesuaian RPD Halaman III DIPA
- Pelaksanaan rapat PPA rutin setiap awal bulan untuk memantau pelaksanaan anggaran

3.2.6. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Target tahun 2023 untuk IKU ini adalah 86 dengan periode pengukuran tahunan, dan capaian yang diperoleh adalah 87.40 dengan persen capaian 101.63%. Pada Tahun 2024 target yang ingin dicapai masih tetap 86 dengan periode pengukuran tahunan. Hingga akhir triwulan I ini telah dilakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya IKU berupa koordinasi antara Kepala Balai dan Kasubbag Umum dengan penanggung jawab kegiatan melalui rapat PPA rutin untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta input capaian output pada aplikasi keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya tetap melaksanakan kegiatan rutin terkait operasional anggaran, pelaksanaan rapat PPA setiap bulan dan pelaporan capaian pada aplikasi terkait.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
----	--

IKU	Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP					
	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
2024	86	87.40	101.63%	-	-	-

3.2.7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP					
202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	100	100	100%	-	-	-

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 100 persen, atau dengan kata lain penyelesaian terhadap seluruh temuan BPK. Hingga akhir tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, sehingga capaian IKU dapat dinyatakan 100%. Untuk tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 100%, hingga akhir Triwulan I tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak ada kegiatan khusus yang perlu dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan IKU ini, tim keuangan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan rutin dengan cermat dan seksama agar kegiatan berjalan lancar dan tidak terdapat kesalahan yang berujung pada temuan. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU ini.

3.2.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 75%, dikarenakan pada akhir Triwulan IV Tahun 2023 di BPISDKP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka capaian disepakati untuk dicantumkan sesuai target dengan persen capaian 100%. Untuk tahun 2024, target yang ingin dicapai adalah 95%. Hingga akhir triwulan I tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti, oleh karena itu untuk mendukung terlaksananya IKU ini, pegawai BPISDKP melaksanakan kegiatan teknis dan manajerial dengan baik dan seksama agar kegiatan berjalan dengan lancar.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
----	--

IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP					
202	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
4	75	75	100	-	-	-

3.2.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat perubahan IKU Dimana IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP dengan target 95 berubah menjadi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 80,5. Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan **Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP BPISDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di BPISDKP, dan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPISDKP. Kategori nilai PM SAKIP BPISDKP yaitu:

Tabel 16. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
----	--

IKU	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP					
	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
2024	80.5	84.30	104.72%	-	-	-

Target tahun ini adalah 84 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini hingga triwulan I adalah:

- a. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3 BPISDKP
- b. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama BPISDKP
- c. Penyusunan Rencana Aksi BPISDKP
- d. Penyusunan Rincian Target IKU
- e. Penyusunan Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2023
- f. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai BPISDKP
- g. Pengumpulan data dukung kinerja BPISDKP

3.2.10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks. Pada tahun 2023 target

yang ingin dicapai adalah 83 dengan capaian 97. Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 95.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP					
2024	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Target TW I	Realisasi	% Capaian
	83	97	116.87	-	-	-

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU ini yaitu:

- Pelatihan untuk analis laboratorium
- Pemasangan dan pelatihan pengoperasian lemari asam
- Pembelian dan pelatihan pengoperasian spektrofotometer
- Penerimaan sampel dari pelanggan
- Survey estuary Perancak
- Pengujian sampel

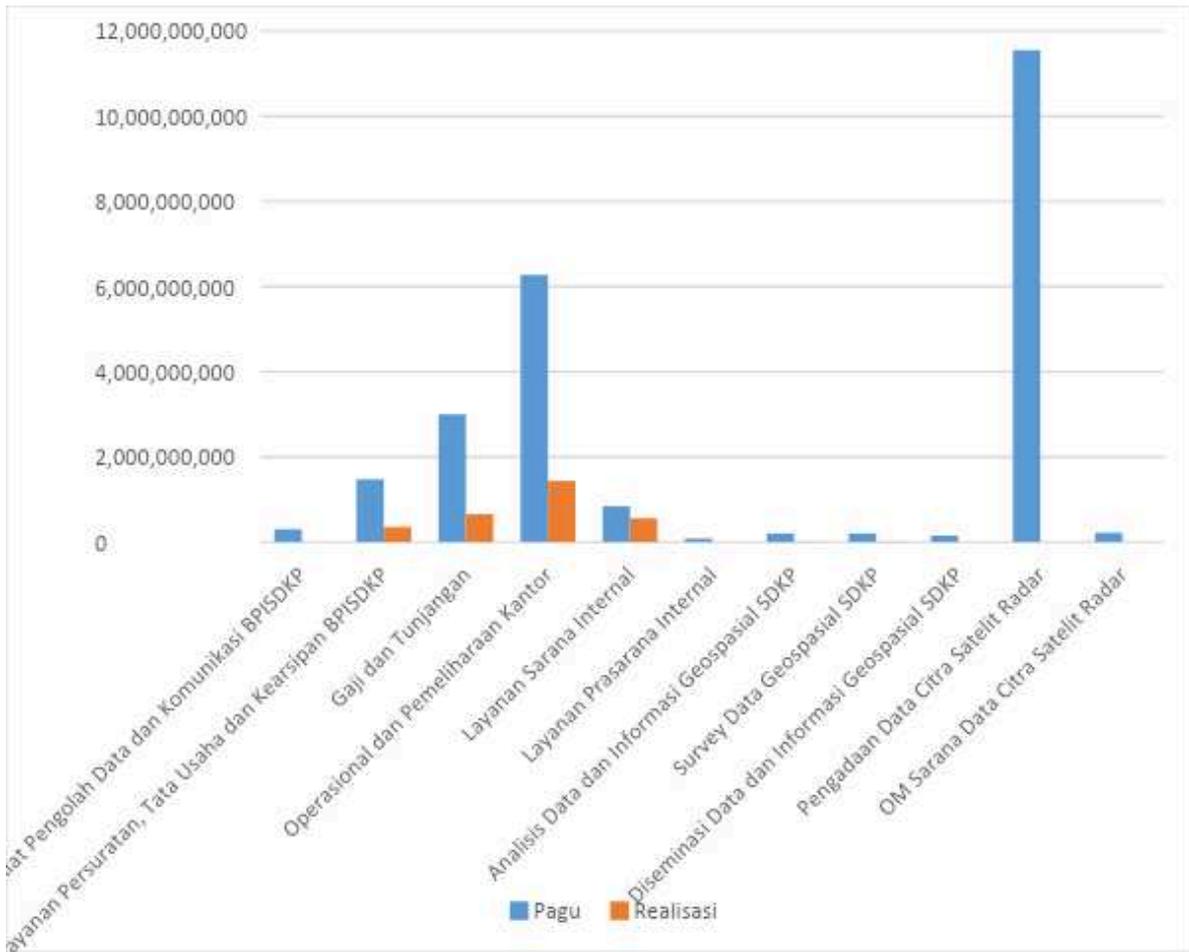
3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPISDKP Tahun 2024 adalah senilai **Rp.28.151.820.000**, - namun terdapat blokir sebesar **Rp. 15.638.541.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW I adalah **Rp. 12.531.279.000**. Penyerapan hingga 31 Maret 2024 sebesar **10.12%**. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Maret 2024

Komponen	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 31 Maret 2024 (Rp)
			(Rp)	(%)	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	1.000.000.000	700.000.000	0	0	300.000.000
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	1.471.270.000		351.460.212	23.89	1.119.809.788

Gaji dan Tunjangan	3.000.000.000		574.094.920	19.13	2.425.905.080
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.451.820.000	1.182.131.000	1.356.621.083	18.20	6.095.198.917
Layanan Sarana Internal	1.562.273.000	720.000.000	555.000.000	35.52	1.007.273.000
Layanan Prasarana Internal	1.253.997.000	1.173.950.000	0	0	1.253.997.000
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	200.000.000		4.704.999	2.35	195.295.001
Survey Data Geospasial SDKP	300.000.000	100.000.000	7.258.000	2.41	192.742.000
Diseminasi Data dan Informasi Geospasial SDKP	150.000.000		0	0	150.000.000
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	11.546.300.000	11.546.300.000	0	0	0
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	216.160.000	216.160.000	0	0	0
TOTAL	28.151.820.000	15.638.541.000	2.849.139.214	10.12	25.302.680.786



Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Maret 2024

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2024 BPISDKP memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok dan fungsi BPISDKP. Pada Triwulan I 2024 dilakukan pengukuran capaian untuk 2 IKU yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP dan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Pada Triwulan I ini, seluruh kegiatan pendukung IKU telah terlaksana secara baik dengan nilai kinerja 112.63 dan pengelolaan anggaran BPISDKP telah menghasilkan penyerapan sebesar 10.12%.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk triwulan berikutnya, beberapa rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain:

- a. Survei estuari dan kegiatan rutin laboratorium kualitas perairan
- b. Uji akurasi dan uji presisi parameter pengujian untuk analisis
- c. Revisi anggaran dan update RPD
- d. Pelaksanaan rencana kegiatan pemeliharaan kantor
- e. Mengadakan rapat rutin PPA untuk memantau pelaksanaan anggaran.

Laporan Kinerja BPISDKP Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0365) 44269
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Toja Arief Wibawa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Toja Arief Wibawa

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER
DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100
		2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94
		4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.76
		6	Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP (nilai)	86
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen)	95
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84
		10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	15.739.360.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	12.412.460.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		28.151.820.000, -

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi


Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Teja Arief Wibawa